

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
(SAP), KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN  
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD  
(Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai)**

**Oleh:**

**Mustika Triwahyuni**

**Pembimbing: Nurazlina dan Alfiati Silfi**

*Prog. Study Accounting Faculty of Economics Univ. Riau, Pekanbaru, Indonesia*

Email: [mustika.triwahyuni@yahoo.co.id](mailto:mustika.triwahyuni@yahoo.co.id)

*The Influence of Appliace of Government Accounting Standards, Competence  
of Human Resources and Appliace of Financial Accounting System  
Toward the Quality of Government Financial Statements  
(Studies In Dumai City Government)*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the influence of appliance government accounting standars (sap), competence of human resource (sdm), and appliance of financial accounting system toward the quality of government financial statement. The research was conducted on the regional work units of Dumai. This study used purposive sampling method. The sample in this study is the Secretary of SKPD, treasurer of SKPD, Head of Sub Division of Finance, and Chief Financial administrator. The sample used in this study were 66 respondents. The statistical method used to test the hypothesis of the research is multiple linear regression analysis using SPSS. The results showed that the variables of appliance government accounting standards and appliance of financial accounting system toward have effect on the quality of financial statement. While the competence of human resource do not have effect on the quality of financial statement. The independent variable can explain the dependent variable of 76,8%. While the remaining 23,2% is explained by other independent variable that are not observed in this study.*

*Keywords: Government Accounting, Competence, Financial Accounting, and Quality of Financial*

**PENDAHULUAN**

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerinta-

han diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggung

Jawabannya.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Sampai saat ini masih banyak permasalahan dan penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2013 Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Dumai kembali lagi mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), diantaranya: 1). Rekening Pemerintah Kota Dumai belum ditetapkan penggunaannya dan terdapat 91 rekening yang belum jelas kepemilikan dan penggunaannya, 2). Aset tetap Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2013 belum dapat diyakini kewajarannya dan aset lain-lainnya.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1). Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah, 2). Terdapat kelemahan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan terdapat kelebihan pembayaran.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Dumai menargetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dengan mempelajari hal-hal yang menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan khususnya terkait aset Pemerintah Kota Dumai menyelesaikan pendataan aset diseluruh instansi serta melaksanakan rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan. (Sumber dari Siaran Pers, 28 Mei 2014).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?, 2). Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?, 3). Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan, 2). Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan, 3). Untuk menguji Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan

perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5), Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para pengguna-nya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari asset, kewajiban, *net worth*, beban dan pendapatan (*gain dan loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan”.

Mardiasmo (2002:160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan

keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1). Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*), 2). Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1). Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah, 2). Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam-nya, 3). Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan, 4). Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional, 5). Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keua-

ngan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur
- b. Dapat diverifikasi
- c. Netralitas

#### 2. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik

daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 3. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan peraturan menteri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Fakhurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. ADB (Asian Development Bank) secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi negara berkembang yang dituangkan dalam makalah berjudul *Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries* dan memberikan tujuh rekomendasi penerapan basis akrual bagi Negara berkembang, yaitu: 1). Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual, 2). Komitmen politik, 3). Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan, 4). Perlunya tenaga akuntan yang andal, 5). Sistem informasi akuntansi harus memadai, 6). Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat, 7). Penerapan basis akrual

harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Alim-budiono & Fidelis, 2004).

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari

seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting, terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus.

### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1) "Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

Akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial (Depkeu,2002:13), yaitu:

1. Tidak bertujuan untuk mengukur laba

2. Tidak adanya kepentingan pemilik

3. Adanya akuntansi anggaran

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Faktor-Faktor yang menyebabkan keterlambatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBD pada Pemerintah Kota Sibolga, Oleh: Endang B. Hutagalung. Demi terselenggaranya perhitungan APBD tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas untuk dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah membutuhkan pemahaman menyeluruh dari pelaksanaan manajemen keuangan daerah dan adanya penyempumaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari Good Government dapat menjadi kenyataan.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pe-

merintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabannya.

Oleh karena itu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani Nurhayati (2013) dengan judul pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan SAP maka akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pe-

merintah Kota Yogyakarta. Menurut Coy *et al.* (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapasitas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri, (Mahmudi, 2010: 9).

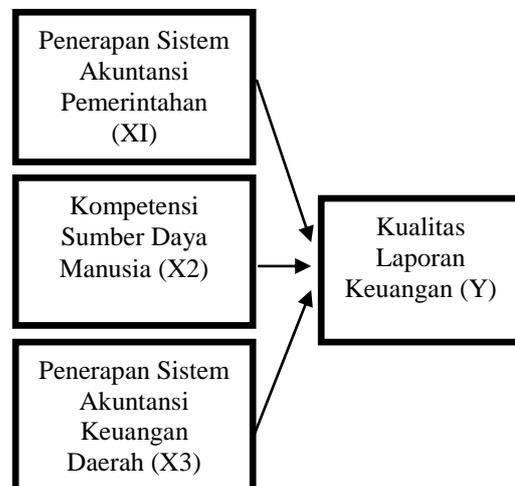
Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo. Dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang baik pula atau sebaliknya.

Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



Sumber: Data Olahan, 2015

### Hipotesis Penelitian

- H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Dumai yang berjumlah 19 SKPD.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2013).

Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan pada SKPD Kota Dumai yang berjumlah 19 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 4 responden yaitu Sekretaris, Bendahara, Kasubag Keuangan, dan Staff Keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 76 responden.

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas laporan keuangan

$\alpha$  = Konstanta  
 $b_{1,2,3,4,5}$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Penerapan standar akuntansi pemerintahan  
 $X_2$  = Kompetensi sumber daya manusia  
 $X_3$  = Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  
 $e$  = *Error term*

### Pengujian Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005:45). Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid.

#### Uji Reliabilitas

Keandalan (*reliability*) pengukuran dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Alfa Cronbach. Alfa Cronbach dihitung dalam hal rata-rata interkorelasi antar item yang mengukur konsep. Semakin dekat Alfa Cronbach dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2006:177). Semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik (Sekaran:182).

### **Uji Asumsi Klasik** **Uji Normalitas Data**

Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34).

### **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2005:91). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105).

### **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Priyatno, 2010:75). Autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

### **Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40).

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:169).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

Dan dari 76 orang responden yang dibagikan kuesioner, sebanyak 8 kuesioner (10,5%) tidak dikembalikan. Dari 68 kuesioner (89,5%) kuesioner yang dikembalikan, sebanyak 2 kuesioner (2,6%) tidak layak untuk diolah. Jadi jumlah sampel akhir dalam penelitian ini adalah sebanyak 66 responden atau 86,8% dari jumlah responden awal yang ditetapkan.

### Statistik Deskriptif Variabel

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh statistik deskriptif variabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif Variabel**

Variabel	Min	Max	Mean
Kualitas Laporan Keuangan	33	55	44,41
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	53	73	62,09
Kompetensi Sumber Daya Manusia	20	30	24,65
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	30	50	41,95

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2015

### Pengujian Kualitas Data

#### Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5 % untuk uji 2 sisi. Nilai  $r_{tabel}$  dapat diperoleh dengan persamaan  $N-2 = 66-2 = 64 = 0,242$ . Dari hasil pengujian diketahui nilai

$r_{hitung}$  seluruh item pertanyaan variabel  $> 0,244$ . Artinya adalah bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dinyatakan valid.

### Pengujian Reabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cornbarh's Alpha*. Jika koefisien alpha yang dihasilkan  $\geq 0,6$ , maka indikator tersebut dikatakan reliabel atau dapat dipercaya. Dari hasil pengujian diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel  $> 0,06$ . Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan reliabel atau dapat dipercaya.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data, dapat dengan melihat *probability plot*. Uji secara *probability plot* adalah dengan melihat data pada garis diagonal. Dari pengujian yang dilakukan diketahui bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi bebas dari multikolinieritas jika *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah

dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *SRESID* dengan residual error yaitu *ZPRED*. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

### Uji Autokolerasi

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW). Dari pengujian yang dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

### Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Regresi Linier**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstand. Coeff.		Stand. Coeff.	T	Sig
	B	SE			
(Constant)	2,577	5,001		0,515	0,608
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,222	0,098	0,277	2,263	0,027
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,383	0,235	0,173	1,629	0,108
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,443	0,123	0,415	3,593	0,001

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$KLK = 2,577 + 0,222 X_1 + 0,383 X_2 + 0,443 X_3 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2,577. Artinya adalah apabila variabel

independen diasumsikan nol (0), maka kualitas laporan keuangan bernilai 2,577.

2. Nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,222. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penetapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,222 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,383. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,383 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,443. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,443 dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Standar error (*e*) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.8 didapat nilai  $t_{hitung}$  senilai

(2,263) dan tingkat signifikansi senilai (0,027). Diketahui nilai  $t_{tabel}$  pada taraf 5% (2-tailed) sebesar 1,999. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung}$  (2,263) >  $t_{tabel}$  (1,999) dan tingkat signifikan (0,027) < (0,05). Maka dapat disimpulkan **H<sub>1</sub> diterima** yaitu variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Pengujian mendapatkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Semakin baik penerapan SAP maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Sebaliknya, semakin kurang baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan SKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani Nurhayati (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Kedua**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.8 didapat nilai  $t_{hitung}$  senilai (1,629) dan tingkat signifikansi senilai (0,108). Diketahui nilai  $t_{tabel}$  pada taraf 5% (2-tailed) sebesar 1,999. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung}$  (1,629) >  $t_{tabel}$  (1,999) dan tingkat signifikan (0,027) < (0,05). Maka dapat disimpulkan **H<sub>2</sub> ditolak** yaitu variabel Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Pengujian mendapatkan hasil bahwa sumber

daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Semakin baik kompetensi SDM maka tidak akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Sebaliknya, semakin kurang baik kompetensi sumber daya manusia maka tidak akan menurunkan kualitas laporan keuangan SKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.8 didapat nilai  $t_{hitung}$  senilai (3,593) dan tingkat signifikansi senilai (0,001). Diketahui nilai  $t_{tabel}$  pada taraf 5% (2-tailed) sebesar 1,999. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung}$  (3,593) >  $t_{tabel}$  (1,999) dan tingkat signifikan (0,001) < (0,05). Maka dapat disimpulkan **H<sub>3</sub> diterima** yaitu variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Pengujian mendapatkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Semakin baik penerapan SAKD maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Sebaliknya, semakin kurang baik penerapan SAKD maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan SKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya variabel penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3**

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,751 <sup>a</sup>	0,564	0,543	2,88294

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2015

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,543. Artinya adalah bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 54,3%. Sedangkan sisanya 45,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

### SIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Dumai.
2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Kota Dumai perlu mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengadakan pelatihan atau diklat kepada pegawai.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Coy et al. 2002. *Public Accounting : A New Paradigm for Collage and University Annual Report ; Critical Perspectives on Accounting*, 12: 1-31.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Kedua. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP Stim YKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Nurhayati, Riani. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Kabupaten Tasikmalaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Priyatno, Duwi. 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran. Yogyakarta : Gaya Media.

Santoso dan Tjiptono. 2004. Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS, PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi Keempat*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Tutun Hermawanto Botutihe. 2013. Pengaruh Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo.